



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, JAMSOSTEK DAN DJSN)**

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : II
Jenis : Penyampaian Aspirasi
Dengan : Tim Pembela Buruh Migran Indonesia (BMI)
Sifat : Terbuka
Hari, tanggal : Senin, 1 Pebruari 2010
Waktu : Pukul 11.00 WIB - selesai
Ketua Rapat : Dr. Ribka Tjiptaning /Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Tamu Pimpinan Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I
Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara : Membahas permasalahan ketenagakerjaan
Jumlah kehadiran : 4 Anggota Komisi IX DPR RI

I. PENDAHULUAN

Pertemuan dengan Tim Pembela Buruh Migran (BMI) dibuka pukul 11.10 WIB.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Pertemuan dihadiri oleh :

- a. Anggota Komisi IX DPR RI antara lain Ibu dr. Ribka Tjiptaning, Bapak Ir. Abdul Aziz Suseno, Bapak Nursuhud, dan Ibu Rieke Diah Pitaloka;
- b. Pihak BNP2TKI yaitu Bapak Mangasi Simanjuntak;
- c. Tim Pembela Buruh Migran Indonesia;
- d. Kepala Desa Kuwo Tegal Taman;
- e. Keluarga Korban Alm. Raisem Binti Wardi.

2. Tim Pembela Buruh Migran Indonesia (BMI), menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pihak KBRI tidak segera melakukan proses pemulangan jenazah buruh migran kepada pihak keluarga korban. Khususnya Alm. Raisem binti Wardi asal Indramayu yang meninggal pada tgl 12 Juli 2009 di Dubai dan alm. Suherlan yang meninggal pada tgl 13 Oktober 2009 di Saudi Arabia.
 - b. KBRI di Dubai tidak mengirimkan surat tembusan kepada Kemenakertrans RI dan BNP2TKI mengenai meninggalnya Alm. Raisem, bahkan keluarga korban tidak diinformasikan mengenai hal tersebut.
 - c. Perlu penjelasan resmi dari Pemerintah terhadap kasus kematian dan pemakaman setiap jenazah buruh migran, khususnya mengenai dugaan HIV yang disinyalir menjadi penyebab meninggalnya Alm. Raisem.
 - d. Perlu mengamanden UU No.39 Tahun 2009 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
 - e. Dalam rangka perlindungan TKI, Pemerintah harus memberikan bantuan dan dukungan terhadap TKI dan segera memberantas para mafia TKI.
 - f. Pemerintah perlu membentuk komisi pengawasan buruh migran.
3. Tim Pembela BMI meminta dukungan Komisi IX DPR RI untuk menyelesaikan permasalahan buruh migran dengan pihak-pihak terkait.
4. Komisi IX DPR RI mendukung penyelesaian permasalahan kasus buruh migran dengan mengagendakan RPD dengan Dirjen Binapenta Kemenakertrans RI, BNP2TKI, dan Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI.

III. CATATAN PENTING

1. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan RDP dengan Dirjen Binapenta Kemenakertrans RI, BNP2TKI, dan Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI.
2. Komisi IX DPR RI mendukung amandemen No.39 tahun 2009 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Pertemuan ditutup pukul 12.10 WIB.

Jakarta, 1 Pebruari 2010
Pimpinan Komisi IX DPR RI
Ketua,



Dr. RIBKA TJIPTANING